



LKJIP 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan. LKjIP Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.



LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah juga untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tahun 2018. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dan meningkatkan kualitas capaian kinerja kami sesuai yang diharapkan di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2019
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ir. SUPARDIYONO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 199302 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
Pendahuluan	1
Gambaran Umum Organisasi	3
Fungsi Strategis DPUPKP Kabupaten Temanggung	8
Permasalahan Utama DPUPKP Kabupaten Temanggung	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	11
Indikator Kinerja Utama	12
Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian kinerja organisasi	39
Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
Tinjauan Umum Capaian Kinerja DPUPKP Kabupaten Temanggung	66
Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	66
LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
LAMPIRAN II Laporan keuangan Tahun 2018	
LAMPIRAN III Laporan evaluasi RKPD s.d triwulan IV tahun 2018	
LAMPIRAN IV Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Foto gambar sertifikat/ piala/ Penyerahan dll)	

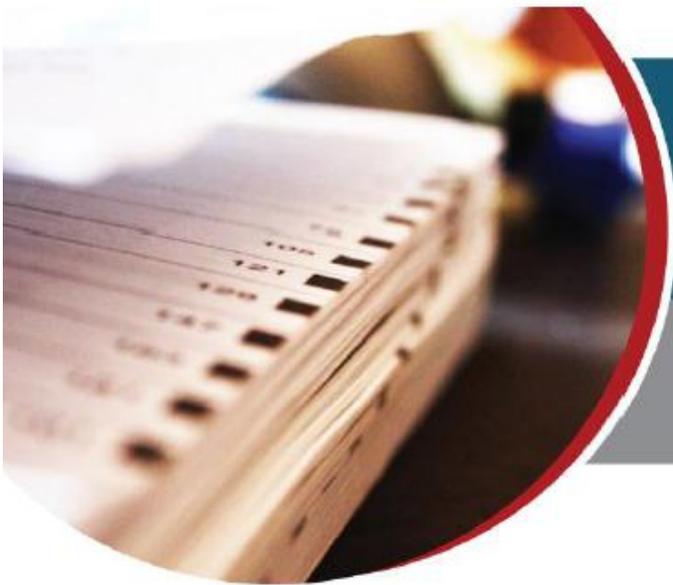
**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	5
Tabel I.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	5
Tabel I.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Tabel I.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural.....	6
Tabel I.5. Sarana dan Prasarana DPUPKP Kab. Temanggung.....	7
Tabel II.1. Indikator Kinerja Utama DPUPKP Kab. Temanggung.....	12
Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 DPUPKP Kab. Temanggung.....	16
Tabel II.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018 DPUPKP Kab. Temanggung..	19
Tabel III.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	40
Tabel III.2. Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2018 di Kab. Temanggung.....	42
Tabel III.3. Data Angka Kecelakaan di Kab. Temanggung.....	42
Tabel III.4. Peningkatan Luas Panen Padi.....	44
Tabel III.5. Daftar Taman Kota Kab. Temanggung Tahun 2018.....	49
Tabel III.6. Tabel Realisasi Anggaran TA 2018 DPUPKP Kab. Temanggung..	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Anggaran Kegiatan DPUPKP 4 Tahun Terakhir	4
Gambar 2.1. Penanda Tanganan Perjanjian Kinerja DPUPKP Tahun 2019 ...	18



BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD



A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

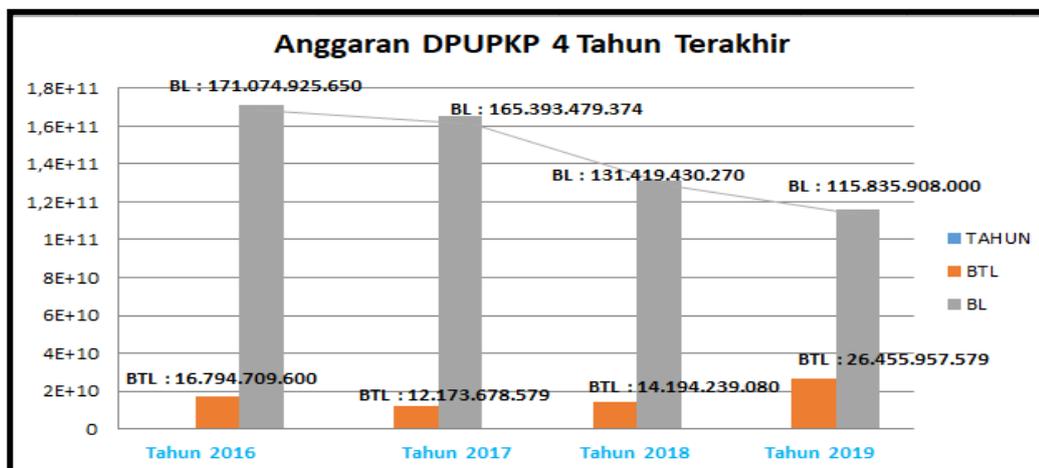
Tahun 2018 merupakan tahun kedua bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten



Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta diatur melalui Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Selain itu tahun 2018 juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung 2013-2018 dalam hal ini adalah review dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum .

Dilihat dari Jumlah kegiatan dan jumlah anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari Sisi Aset yang dikelola telah mencapai Rp 1.947.368.825.905,00.

Tantangan akan berkurangnya jumlah pegawai, permasalahan semakin kompleks dan jumlah kegiatan yang harus dilakukan semakin banyak seiring peningkatan jumlah anggaran yang harus dilaksanakan menuntut akuntabilitas, produktifitas, efektifitas dan efisiensi yang lebih baik guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*). Anggaran kegiatan dapat dilihat pada gambar Anggaran Kegiatan DPUPKP 4 Tahun Terakhir



Gambaran 1 :Anggaran Kegiatan DPUPKP 4 Tahun Terakhir.



B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta diatur melalui Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah merupakan salah satu dinas Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan DPUPKP berdasarkan rencana strategis bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan jasa konstruksi meliputi pengelolaan administrasi kegiatan, perencanaan kegiatan, pengelolaan operasional dan pemeliharaan, penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi jalan dan jembatan, bangunan gedung, perumahan dan kawasan permukiman, tata kota dan jasa konstruksi serta tata ruang dan pertanahan Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum; serta
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang pekerjaan umum;



- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi dibidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- f. Pengendalian dan pembinaan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Penyelenggaraan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung didukung personalia sebanyak 412 pegawai yang terdiri dari berstatus PNS dan non PNS.

Jumlah PNS berdasarkan jenis pendidikannya yaitu : S-2 sebanyak 9 orang, S-1 sebanyak 22 orang, D-III sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 64 orang, SLTP sebanyak 43 orang dan yang berpendidikan SD sebanyak 21 orang.

Jumlah Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

Nomor	Status	Jumlah
1.	PNS	167
2.	Tenaga Pendukung	245
Jumlah		412 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan



Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Nomor	Golongan	Jumlah
1.	I	46 orang
2.	II	74 orang
3.	III	39 orang
4.	IV	7 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Nomor	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S 2	9 orang
2.	S 1	22 orang
3.	D III	7 orang
4.	SLTA	64 orang
5.	S M P	43 orang
6.	S D	21 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018



Tabel I.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural

Nomor	Penjenjangan / Diklat	Jumlah
1.	SPAMA	0 orang
2.	DIKLAT PIM III	2 orang
3.	DIKLAT PIM IV	17 orang
	JUMLAH	19 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung terbagi dalam struktur yang dapat dilihat dalam gambar Struktur Organisasi terlampir.

Sementara untuk mendukung Tugas dan Fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel I.5
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah			-
	Tanah	512	Bidang	Baik
b.	Peralatan dan Mesin			
	Alat - Alat Besar	24	Buah/unit	Baik
	Alat Angkut	160	Buah/unit	Baik
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	33	Buah/unit	Baik
	Alat Pertanian	3	Buah/unit	Baik
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	895	Buah/unit	Baik



	Alat Studio dan Alat Komunikasi	11	Buah/unit	Baik
	Alat - Alat Kedokteran	1	Buah/unit	Baik
	Alat Laboratorium	7	Buah/unit	Baik
	Alat - Alat Persenjataan/Keamanan	0	Buah/unit	Baik
c	Golongan Gedung dan Bangunan			
	Bangunan dan Gedung	50	Unit	Baik
	Monumen	9	Unit	Baik
d	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Jalan dan Jembatan	701	Unit	Baik
	Bangunan Air/Irigasi	890	Unit	Baik
	Instalasi	11	Unit	Baik
	Jaringan	8	Unit	Baik
e	Aset Tetap Lainnya			
	Buku Perpustakaan	15	Buah	Baik
	Barang Bercorak Kebudayaan	1	Buah	Baik
	Tanaman	2.612	Buah	Baik
f	Barang Ekstrakomptabel	1054	Buah	Baik

C. Fungsi Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung secara umum memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dibidang melaksanakan urusan dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

Secara singkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Penataan ruang wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Perluasan jaringan jalan dan jembatan serta pengembangan jaringan irigasi;



3. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan irigasi;
4. Memperpanjang usia konstruksi untuk jalan, jembatan dan sarana irigasi dengan melakukan pemeliharaan secara rutin;
5. Pemanfaatan secara maksimal infrastruktur yang sudah dibangun;
6. Meningkatkan prasarana untuk mencapai pemukiman layak huni;
7. Mengoptimalkan kelengkapan sarana pendukung, guna memperlancar pelaksanaan pekerjaan infrastruktur konstruksi jalan, jembatan dan pengairan;
8. Mengembangkan teknologi ke-PU-an yang tepat guna serta dapat meningkatkan keandalan mutu infrastruktur;
9. Meningkatnya pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

D. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Adapun permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, dan pertanahan secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kemampuan penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang disebabkan keterbatasan SDM dan keuangan;
2. Tidak optimal waktu pelaksanaan pekerjaan dari pelelangan sampai akhir pekerjaan;
3. Meningkatnya jumlah dan ruang lingkup kegiatan/pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah dan kemampuan personel dan peralatan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk RTH.



Tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung lebih dari satu urusan, yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum meliputi antara lain :
 - a. Jalan dan jembatan
 - b. Irigasi dan air tanah
 - c. Air bersih, air limbah, drainase, dan trotoar
2. Urusan Perumahan Rakyat meliputi antara lain :
 - a. Rumah tidak layak huni
 - b. Perumahan pada daerah rawan bencana
 - c. Permukiman kumuh di kawasan perkotaan
 - d. Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman
 - e. Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
3. Urusan Penataan Ruang meliputi antara lain:
 - a. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah
4. Urusan Pertanahan :
 - a. Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan pengadaan tanah untuk pemerintah.
 - b. Penyelesaian masalah pertanahan.

Permasalahan yang timbul karena kondisi dari beberapa urusan tersebut masih belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya :

a. Pekerjaan Umum

- 1.) Masih adanya jalan, jembatan, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang rusak ringan dan rusak berat;
- 2.) Belum optimalnya sistem informasi infrastruktur daerah;
- 3.) Rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kepadatan lalu lintas;
- 4.) Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelayanan air bersih;
- 5.) Rendahnya pengelolaan, pengusaha, dan pemanfaatan air tanah;



- 6.) Banyaknya jaringan irigasi yang tidak terpelihara dengan baik dan masih rendahnya upaya pembangunan jaringan irigasi baru.

b. Perumahan Rakyat

- 1.) Banyaknya rumah tidak layak huni;
- 2.) Adanya kawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana;
- 3.) Adanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
- 4.) Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman masih belum memenuhi standart.
- 5.) Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dasar air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL).

c. Penataan Ruang

- 1.) Belum ditetapkannya rencana detail tata ruang dan belum tersusunnya dokumen lain yang diamanatkan dalam RTRW;
- 2.) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 3.) Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

d. Pertanahan

- 1) Belum tersedia data yang valid, dokumen pendukung tidak terdokumentasi dengan baik, kesulitan mendapatkan tanah pengganti dengan kelas yang sama.
- 2) Data kepemilikan belum valid, dokumen pendukung tidak terdokumentasi dengan baik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, Telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu



A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

“MENJADIKAN INFRASTRUKTUR YANG LAYAK DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”



Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Memberdayakan dan Melestarikan Infrastruktur Transportasi Darat, Irigasi dan Sumber Daya Air;
2. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Memadai, Serasi dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Managemen yang Profesional di Bidang Pembangunan untuk Urusan urusan dalam bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

B. Indikator Kinerja Utama



Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Indikator Kinerja Utama DPUPKP Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2018	Rumus
1	2	3		5	7
1.	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai	1.	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat (%)	79%	jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan memenuhi standart rambu lalu lintas /panjang jalan kabupaten
		2.	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman (%)	79%	jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan memenuhi standart rambu lalu lintas /panjang jalan kabupaten



		3.	Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana (%)	79%	jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan memenuhi standart rambu lalu lintas /panjang jalan kabupaten
		4.	Persentase Jalan yang Kondisi Baik (%)	79%	jumlah jalan kabupaten kondisi baik dan sedang/ jumlah jalan kabupaten yang ada x 100 %
		5.	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (%)	87%	jumlah jembatan kondisi baik dan sedang/ jumlah jembatan yang ada x 100 %
		6.	Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik (%)	80%	Jumlah alat berat dalam kondisi baik dibagi jumlah alat berat yang ada x 100
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Insfrastruktur Sumber Daya Air	1.	Tersedianya Air Irigasi pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada	78%	jumlah jaringan irigasi yang kondisi baik dan sedang/ jumlah keseluruhan jaringan irigasi x 100 %
		2.	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	5.87%	Jumlah pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif pada skala DI / Jumlah DI yang ada x 100%
		3.	Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan	40.5%	Data Panjang Jaringan drainase pada skala kawasan/kota yang ada / data panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota
3.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Melalui Ketersediaan Bangunan Instansi Pemerintah	1.	Persentase Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan yang Memadai	95%	jumlah unit kantor kecamatan yang akan dibangun
4.	Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni	1.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	95.88%	jumlah Rumah layak huni dibagi jumlah rumah yang ada x 100 %
		2.	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	22.30%	jumlah luasan kawasan kumuh perkotaan yang ada
		3.	Cakupan Layanan Air Minum yang Layak (%)	90.20%	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak / jumlah rumah tangga yang ada x 100%
		4.	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (%)	77.40%	jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak / jumlah rumah tangga yang ada x 100%
		5.	Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota	8.0%	jumlah rumah tangga yg terlayani air limbah skala kawasan kota / jumlah rumah tangga pada skala kawasan kota x 100 %
		6.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum	64%	jumlah lingkungan (desa/ kelurahan) yg sehat dan aman yg didukung prasarana sarana



					utilitas/ jumlah lingkungan (kelurahan/ desa)
5.	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	1.	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) beserta Rencana Rincinya (PERDA)	3	tersedianya PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
		2.	Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTRW beserta Rencana Rinci (%)	100%	jumlah penjaringan aspirasi/konsultasi publik dalam penyusunan RTR / jumlah penjaringan aspirasi yang seharusnya dilakukan x 100
		3.	Tersedianya Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik pada Skala Kawasan/Kota (%)	30.50%	jumlah luasan RTH publik / jumlah luasan perkotaan x 100
		4.	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (%)	17%	jumlah ruas pedestrian yang dibangun / jumlah jalur pedestrian yang seharusnya dibangun x 100%
		5.	Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya (%)	100%	jumlah izin yang disetujui/ jumlah pemohon izin yang masuk x 100
		6.	Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang (%)	100%	Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti / jumlah pengaduan x 100
6.	Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi	1.	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun	100%	
7.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan		Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	96,13	Jumlah tanah pemerintah daerah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah pemerintah daerah x 100
			Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	17.5	Jumlah bidang tanah pemerintah desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten diganti dibagi jumlah bidang tanah pemerintah desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten x 100

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja



terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai **lampiran I** perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 21 program, 82 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 138.288.592.493,00 (belanja daerah sesuai dengan dokumen Penjabaran Perubahan APBD 2018).



Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dintanpangan dengan Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	RUMUS	TARGET 2018
1		2	3	4
A. 1. Mengembangkan Memberdayakan dan Melestarikan Infrastruktur Transportasi Darat, Irigasi dan Sumber Daya Air				
1.	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat (%)		79%
		Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman (%)		79%
		Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana (%)		79%
		Persentase Jalan yang Kondisi Baik (%)		79%
		Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (%)		87%
		Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik (%)		80%
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sumber Daya Air	Tersedianya Air Irigasi pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada		78%
		Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif		5.87%



		Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan/Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan		40.5%
3.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Melalui Ketersediaan Bangunan Instansi Pemerintah	Persentase Kondisi Bangunan Gedung Kantor Kecamatan yang Memadai		95%
4.	Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		95.88%
		Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan		22.30%
		Cakupan Layanan Air Minum yang Layak (%)		90.20%
		Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (%)		77.40%
		Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota		8.0%
		Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum		64%
5.	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) beserta Rencana Rincinya (PERDA)		3
		Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTRW beserta Rencana Rinci (%)		100%
		Tersedianya Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik pada Skala Kawasan/Kota (%)		30.50%



		Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (%)		17%
		Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya (%)		100%
		Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang (%)		100%
6.	Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun		100%

KINERJA DPUPKP TAHUN 2018





Tabel II.3
Program dan Kegiatan DPUPKP Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132,000,000	Sumber Dana APBD
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	291,483,200	Sumber Dana APBD
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	137,704,100	Sumber Dana APBD
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48,687,500	Sumber Dana APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,360,000	Sumber Dana APBD
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,675,000	Sumber Dana APBD
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132,530,000	Sumber Dana APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,700,000	Sumber Dana APBD
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	57,600,000	Sumber Dana APBD
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	154,665,000	Sumber Dana APBD
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,200,000	Sumber Dana APBD
12.	Jasa Pelayanan Perkantoran	231,097,860	Sumber Dana APBD
13.	Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum	43,963,400	Sumber Dana APBD
14.	Penyusunan SPM Pekerjaan Umum	39,187,400	Sumber Dana APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
15.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	86,005,000	Sumber Dana APBD
16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	77,928,200	Sumber Dana APBD
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	49,500,000	Sumber Dana APBD
18.	Pembangunan Gedung	3,958,162,900	Sumber Dana APBD
19.	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Daerah	205,320,000	Sumber Dana APBD
20.	Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan	499,326,000	Sumber Dana APBD



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
22.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	44,433,000	Sumber Dana APBD
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
23.	Pembangunan Jembatan	8,882,023,000	Sumber Dana APBD
24.	Peningkatan Jembatan	2,793,481,000	Sumber Dana APBD
25.	Peningkatan Jalan Kabupaten	4,737,182,000	Sumber Dana APBD
26.	DAK Penugasan Sub Bidang Jalan	16,990,000,000	Sumber Dana APBD
27.	Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan	11,814,287,000	Sumber Dana APBD
28.	Pembangunan Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi (Ban-Keu)	7,255,000,000	Sumber Dana APBD
29.	Peningkatan Jalan Kabupaten (DID)	3,131,055,000	Sumber Dana APBD
30.	Fasilitasi Pembangunan Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi	74,080,000	Sumber Dana APBD
31.	Fasilitasi DAK Bidang Kebinamargaan	298,255,000	Sumber Dana APBD
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			
36.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	199,510,000	Sumber Dana APBD
37.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1,462,650,000	Sumber Dana APBD
38.	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	897,414,000	Sumber Dana APBD
39.	Perbaikan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan	400,290,248	Sumber Dana APBD
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			
40.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	993,415,400	Sumber Dana APBD
41.	Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	2,396,130,000	Sumber Dana APBD
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
42.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1,090,710,000	Sumber Dana APBD
43.	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	4,689,049,100	Sumber Dana APBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
44.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	95,420,000	Sumber Dana APBD
45.	Fasilitasi Penyusunan Raperda	14,883,500	Sumber Dana APBD
46.	Sarpras Kelurahan Bidang Kebinamargaan	1,495,758,200	Sumber Dana APBD
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
47.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	198,943,300	Sumber Dana APBD
48.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	1,989,920,300	Sumber Dana APBD
49.	Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air	24,569,000	Sumber Dana APBD
50.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	2,073,359,735	Sumber Dana APBD
51.	Pembangunan Jaringan Air Bersih	812,825,000	Sumber Dana APBD
52.	DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	5,589,333,000	Sumber Dana APBD
53.	Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	92,167,000	Sumber Dana APBD
54.	Pemetaan Jaringan Irigasi	466,335,790	Sumber Dana APBD
55.	Penyusunan DED Irigasi	294,520,700	Sumber Dana APBD
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
56.	Review DED Rest Area Pringsurat	198,629,400	Sumber Dana APBD
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			
57.	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	217,225,200	Sumber Dana APBD
Pengembangan Prasarana Perkotaan			
58.	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	1,000,000,000	Sumber Dana APBD
59.	Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum	1,965,500,000	Sumber Dana APBD
60.	Pendataan LPJU	395,182,000	Sumber Dana APBD
61.	Pemeliharaan Panggung Reklame	48,463,500	Sumber Dana APBD
62.	Pembayaran LPJU	14,200,421,000	Sumber Dana APBD
63.	Pengadaan Lampu Kota	1,000,000,000	Sumber Dana APBD
64.	Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi PJU	269,561,000	Sumber Dana APBD
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar			
65.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar	599,948,000	Sumber Dana APBD
66.	Pembangunan Trotoar	2,410,385,000	Sumber Dana APBD
67.	DED Pembangunan Trotoar	142,690,850	Sumber Dana APBD



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
68.	Pembinaan Jasa Konstruksi	43,262,840	Sumber Dana APBD
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
69.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	116,277,600	Sumber Dana APBD
70.	Operasional BKRD dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang	100,915,000	Sumber Dana APBD
71.	Penyusunan Revisi Perda RTRW	125,615,850	Sumber Dana APBD
72.	Penyusunan Raperda Penyerahan Asset Fasum Fasos Pengembang Perumahan	20,000,000	Sumber Dana APBD
73.	UKL UPL Pembangunan Jembatan Gantung Tlogowungu dan Embung Cemoro	40,000,000	Sumber Dana APBD
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
74.	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	97,162,800	Sumber Dana APBD
75.	Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	930,988,000	Sumber Dana APBD
76.	Pemeliharaan Taman	1,499,999,640	Sumber Dana APBD
77.	Pembangunan City Walk	1,429,149,000	Sumber Dana APBD
78.	Pembangunan Kawasan Aloon-Aloon Lanjutan (depan BCA)	1,039,820,000	Sumber Dana APBD
Program Pengembangan Perumahan			
79.	Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni	222,871,100	Sumber Dana APBD
80.	Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	198,714,300	Sumber Dana APBD
81.	Pengadaan PSU Rusunawa	762,868,600	Sumber Dana APBD
Program Lingkungan Sehat Perumahan			
82.	Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	181,260,000	Sumber Dana APBD
83.	Dana Gotong royong	974,436,000	Sumber Dana APBD
84.	Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	93,999,900	Sumber Dana APBD
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
85.	Pengadaan Tanah Pemerintah	8,200,000,000	Sumber Dana APBD



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			
86.	Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	38,411,000	Sumber Dana APBD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
87.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3,500,000	Sumber Dana APBD



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan



Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, setidaknya terdapat 7 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :



Tabel III.2
Sasaran Strategis DPUPKP Tahun 2018

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8	$9=8/7*100$
1.	Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat	%	79	82.42	104.33	82	84.15	102.62
2.	Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman	%	79	82.42	104.33	82	84.15	102.62
3.	Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Rencana	%	88	90	102.27	90	90.55	100.61
4.	Tersedianya lahan untuk persiapan pembangunan jalan lingkar Kota Parakan	Hektar (Ha)	11	1	9.09	19	0	0.00
5.	Persentase Jalan yang Kondisi Baik	%	79	80.42	101.80	82	84.15	102.62
6.	Persentase Jembatan yang Kondisi Baik	%	87	90	103.45	90	92.24	102.49
7.	Persentase Tersedianya Alat Berat dengan Kondisi Baik	%	80	77.78	97.23	85	86.66	101.95
8.	Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada	%	78	83.88	107.54	82	83.88	102.30
9.	Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif	%	5,873	14.38	0.24	6.19	15.77	254.79
10	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	40.5	40.6	100.25	40.7		0.00
11	Persentase kondisi bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai	%	95	100	105.26	100		0.00



No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
12	tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya	PERDA	3	2	66.67	3	2	66.67
13	terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci	%	100	100	100.00	100	100	100.00
14	Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian	%	17.3	16.74	96.76	17.6	16.88	95.91
15	Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya	%	100	100	100.00	100	87.64166	87.64
16	Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang	%	100	100	100.00	100	100	100.00
17	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95.88	97.01	101.18	96.2	86.1479	89.55
18	berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	Hektar (Ha)	22.3	19.91	89.28	19.91	19.51	97.97
19	Cakupan Layanan Air Minum yang layak	%	90.2	89.78	99.53	91.3	85.82	94.00
20	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	77.4	80.24	103.67	80.24	80.48	100.30
21	Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota	%	8	7.5	93.75	8.2	7.90	96.34
22	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum	%	64	70	109.38	76		0.00
23	Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat	%	96.13	96.13	100.00	100		0.00



No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
24	Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten	%	17.5	17.5	100.00	20	20	100.00
25	terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan	unit	7	0	0.00	8	0	0.00

Panjang jalan di Kabupaten Temanggung seluruhnya 739,127 km. Pencapaian pembangunan dan pemeliharaan jalan yang baik pada tahun 2018 sepanjang 632.960 km atau 85,63%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaiannya telah melampaui (capaian 82.16%, target akhir RPJMD 82%). Dengan telah dicapainya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat sebesar 82,16%, maka jalan jalan di Kabupaten Temanggung telah bisa dinyatakan bahwa kondisi fungsi pelayanan jalan yang ada sudah layak untuk berkendara.

Kondisi kelayakan jalan dapat diukur berdasarkan peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2010 tentang tatacara, persyaratan, dan penetapan laik fungsi jalan. Berdasarkan peraturan tersebut, kondisi jalan di Kabupaten Temanggung dapat disebut dalam kondisi baik.



Tabel III.2
Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

JENIS JALAN	KONDISI JALAN					
	PANJANG JALAN		BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	(Km)	%	Panjang (Km)	Panjang (Km)	Panjang (Km)	Panjang (Km)
ASPAL	649,369	87,75				
BETON	63,178	8,65				
TELFORD	24,130	3,26				
TANAH	2,450	0,33				
TOTAL	739,127	100,00	499,936	133,024	51,092	55,075
Prosentase			67,639	17,997	6,912	7,451

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018 untuk prosentase pembangunan jaringan irigasi partisipatif telah mencapai 14,38 % dan telah sesuai target tahunan dari target akhir RPJMD adalah 6,19%.

Dengan semakin meningkatnya capaian kinerja pembangunan jaringan irigasi partisipatif maka pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaanya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani semakin besar. Dampak hasil kegiatan irigasi diukur dari peningkatan luasan lahan panen padi sebagai mana terlampir :



Sedangkan untuk prosentase tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan kota sehingga tidak terjadi genangan telah tercapai 40,6% dan telah sesuai target tahunan dari target akhir RPJMD 40 %. Sehingga saat ini genangan air dan banjir semakin berkurang di kawasan perkotaan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 15.942.147.190,00- atau 94,74 % dari total pagu sebesar Rp. 16.827.184.000,00- dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Rp. 977.329.300,00- atau 97,83 % dari total pagu sebesar Rp. 999.027.600,00- dari Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,17 % dari pagu yang tersedia.

Semua indikator pada sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang telah memenuhi target.

Untuk capaian kinerja Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya tercapai 2 buah perda dengan target akhir RPJMD 3 perda. Sedang indikator kinerja persentase Cakupan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya tercapai 100 % dari target akhir RPJMD sebesar 100%.

Capaian Sasaran ini bisa dibuktikan dengan telah dibuatnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Temanggung, dan peruntukan ruang yang tidak sesuai masih kecil yaitu sebesar 66,66%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 77.232.050,00- atau sebesar 92,07 % dari total pagu sebesar Rp. 83.884.000,00- dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,93%.



Keberhasilan pencapaian sasaran ini sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Peningkatan realisasi kinerja Persentase Taman/Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dengan kriteria baik di Tahun 2018 dari 2 (dua) tahun sebelumnya, tidak lepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk memelihara RTH yang sudah ada, serta menciptakan RTH baru. Dari target 30,5% dan terealisasi sebesar 30,25% di Tahun 2018 merupakan hasil dari penataan RTRW yang senantiasa dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung. Tabel berikut menyajikan lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Temanggung:

Tabel III.5
Daftar Taman Kota Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	
1	2	3	4	
I	TAMAN KOTA			
1.	Aloon-aloon	Aloon-aloon Kota Temanggung	1,675.00	M2
2.	Taman Pengayoman	Jl. Dr Wahidin Temanggung	6,000.00	M2
3.	Taman Bambu Runcing	Jl. Jend. Sudirman Temanggung	985.20	M2
4.	Taman Bendo	Jl. Jend. Sudirman Temanggung	1,050.00	M2
5.	Taman Kr. Tumaritis	Jl. Suwandi Suwardi Temanggung	1,373.95	M2
6.	Taman Gedung DPRD	Jl. Lingkar Aloon-aloon Temanggung	243.00	M2
7.	Taman Pandean	Jl. MT. Haryono Temanggung	16.00	M2
8.	Taman Siklontong	Jl. Dr. Wahidin Temanggung	101.46	M2



NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	
1	2	3	4	
9.	Taman Brojolan	Jl. Diponegoro Temanggung	261.80	M2
10.	Taman Gumuk Lintang	Jl. Jend. Sudirman Temanggung	1,236.75	M2
11.	Taman Boulevard Stadion	Jl. Jend. Sudirman Temanggung	320.00	M2
12.	Taman Eks Kerkoff	Jl. Suyoto Temanggung	414.00	M2
13.	Taman Eks Stasiun I	Jl. Lingkar Setda Temanggung	722.00	M2
14.	Taman Eks Stasiun II	Jl. Lingkar Setda Temanggung	141.00	M2
15.	Taman Pramuka	Jl. Lingkar Setda Temanggung	59.50	M2
16.	Taman Jago	Jl. WR. Supratman Temanggung	67.50	M2
17.	Taman Kali Progo	Jl. Suwandi Suwardi Temanggung	7,196.20	M2
18.	Taman Pikatan	Jl. Pahlawan Temanggung	590	M2
19.	Taman Situk	Jl. Parakan	17,000.00	M2
		JUMLAH I	39,453.36	M2
II	HUTAN KOTA			
18.	Gumuk Lintang	Jl. Jend. Sudirman Temanggung	9,450.00	M2
19.	Gumuk Godek	Jl. Suwandi Suwardi Temanggung	1,500.00	M2
		JUMLAH II	10,950.00	M2
III	PULAU JALAN			
20.	Tugu Adipura	Jl. Lingkar Setda Temanggung	51.00	M2
21.	Tugu Pancasila	Pertigaan Jl. Jend. Sudirman Temanggung	8.75	M2



NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	
1	2	3	4	
22.	Pulau Jalan Subur	Pertigaan Jl. Diponegoro Temanggung	96.43	M2
23.	Pulau Jalan Sri Suwarno	Pertigaan Jl. Sri Suwarno Temanggung	68.25	M2
24.	Pulau Jalan Telkom	Pertigaan Jl. Jend. Sudirman Temanggung	67.12	M2
25.	Pulau Jalan Kranggan	Pertigaan Pasar Kranggan	30.86	M2
26.	Pulau Jalan RSBG	Pertigaan RSBG Temanggung	20.10	M2
		JUMLAH III	342.51	M2
IV	JALUR HIJAU			
27.	Jalur Hijau Jl. Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk Temanggung	240.00	M2
28.	Jalur Hijau Jl. Gajahmada	Jl. Gajahmada Temanggung	1,556.00	M2
29.	Jalur Hijau Jl. Diponegoro	Jl. Diponegoro Temanggung	460.30	M2
30.	Jalur Hijau Jl. Sudirman I	Jl. Jend. Sudirman Temanggung	258.40	M2
31.	Jalur Hijau Jl. Sudirman II	Jl. Jend. Sudirman Temanggung	1,160.00	M2
32.	Jalur Hijau Jl. Suwandi Suwardi	Jl. Suwandi Suwardi Temanggung	1,799.00	M2
33.	Jalur Hijau Jl. R. Suprpto	Jl. R. Suprpto Temanggung	258.00	M2
34.	Jalur Hijau Jl. S Parman	Jl. S. Parman Temanggung	434.00	M2
35.	Jalur Hijau Jl. Tentara Pelajar	Jl. Tentara Pelajar Temanggung	234.00	M2
36.	Jalur Hijau Jl. Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani Temanggung	50.00	M2
37.	Jalur Hijau Jl. Suyoto	Jl. Suyoto Temanggung	369.00	M2
38.	Jalur Hijau Jl. Raya Kranggan	Jl. Raya Kranggan - Temanggung	1,102.40	M2
39.	Jalur Hijau Jalan Suwaji Parakan	Jl. Raya Parakan	590	M2



NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	
1	2	3	4	
		JUMLAH IV	7,921.10	M2
		JUMLAH SELURUHNYA (I+II+III+IV)	58,666.97	M2



Berdasarkan perhitungan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah 144,12 % sehingga dapat dikategorikan sangat baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 138.288.592.493,00- Anggaran tersebut bersumber dari APBD secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 12.194.239.080,00-
2. Belanja Modal, Barang dan Jasa, sebesar Rp 126.094.353.413,00-



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	
Peningkatan Kualitas Pengelola Infrastruktur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132,000,000	68,748,312	52.08	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	291,483,200	230,662,114	79.13	
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	137,704,100	103,012,842	74.81	
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	48,687,500	47,779,800	98.14	
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,360,000	36,553,925	72.59	
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,675,000	16,472,000	98.78	
	7. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132,530,000	128,328,500	96.83	
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,700,000	2,620,000	97.04	
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	57,600,000	55,032,000	95.54	
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	154,665,000	86,644,100	56.02	
	11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	15,200,000	4,375,000	28.78	
	12. Jasa Pelayanan Perkantoran	231,097,860	196,694,396	85.11	
	13. Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum	43,963,400	35,057,015	79.74	
	14. Penyusunan SPM Pekerjaan Umum	39,187,400	28,779,445	73.44	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,876,242,100	4,846,233,700	99.38
		15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	86,005,000	83,416,250	96.99
	16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	77,928,200	77,908,650	99.97	
	17. Pemeliharaan Rutin/Berkala	49,500,000	44,000,500	88.89	



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	Peralatan Gedung Kantor			
	18. Pembangunan Gedung	3,958,162,900	3,957,640,400	99.99
	19. Pemeliharaan Gedung Pemerintah Daerah	205,320,000	198,595,900	96.73
	20. Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakarya	499,326,000	484,672,000	97.07
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44,433,000	44,165,000	99.40
	22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	44,433,000	44,165,000	99.40
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	55,975,363,000	51,728,899,574	92.41
	23. Pembangunan Jembatan	8,882,023,000	6,378,981,695	71.82
	24. Peningkatan Jembatan	2,793,481,000	2,780,359,817	99.53
	25. Peningkatan Jalan Kabupaten	4,737,182,000	4,695,540,569	99.12
	26. DAK Penugasan Sub Bidang Jalan	16,990,000,000	15,638,844,000	92.05
	27. Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan	11,814,287,000	11,786,072,893	99.76
	28. Pembangunan Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi (Ban-Keu)	7,255,000,000	7,039,370,000	97.03
	29. Peningkatan Jalan Kabupaten (DID)	3,131,055,000	3,112,652,366	99.41
	30. Fasilitasi Pembangunan Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi	74,080,000	68,574,700	92.57
	31. Fasilitasi DAK Bidang Kebinamargaan	298,255,000	228,503,534	76.61
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,959,864,248	2,902,935,365	98.08
	36. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	199,510,000	193,722,500	97.10
	37. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1,462,650,000	1,452,979,800	99.34



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	38. Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	897,414,000	856,516,817	95.44
	39. Perbaikan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan	400,290,248	399,716,248	99.86
	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	3,389,545,400	3,304,174,515	97.48
	40. Pembangunan Turap/Talud/Brojong	993,415,400	974,533,400	98.10
	41. Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan	2,396,130,000	2,329,641,115	97.23
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5,779,759,100	5,481,734,688	94.84
	42. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1,090,710,000	1,059,642,089	97.15
	43. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan	4,689,049,100	4,422,092,599	94.31
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1,606,061,700	1,538,177,528	95.77
	44. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	95,420,000	56,714,828	59.44
	45. Fasilitasi Penyusunan Raperda	14,883,500	9,485,500	63.73
	46. Sarpras Kelurahan Bidang Kebinamargaan	1,495,758,200	1,471,977,200	98.41
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	11,541,973,825	10,185,937,887	88.25
	47. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	198,943,300	139,437,808	70.09
	48. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	1,989,920,300	1,767,753,330	88.84
	49. Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air	24,569,000	19,090,700	77.70



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	50. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	2,073,359,735	2,064,940,635	99.59
	51. Pembangunan Jaringan Air Bersih	812,825,000	810,179,900	99.67
	52. DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	5,589,333,000	4,575,633,262	81.86
	53. Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	92,167,000	66,013,622	71.62
	54. Pemetaan Jaringan Irigasi	466,335,790	461,838,530	99.04
	55. Penyusunan DED Irigasi	294,520,700	281,050,100	95.43
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	198,629,400	194,459,200	97.90
	56. Review DED Rest Area Pringsurat	198,629,400	194,459,200	97.90
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	217,225,200	193,565,145	89.11
	57. Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	217,225,200	193,565,145	89.11
	Pengembangan Prasarana Perkotaan	18,879,127,500	15,403,669,452	81.59
	58. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	1,000,000,000	988,002,060	98.80
	59. Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum	1,965,500,000	1,938,139,100	98.61
	60. Pendataan LPJU	395,182,000	349,005,616	88.32
	61. Pemeliharaan Panggung Reklame	48,463,500	28,543,312	58.90
	62. Pembayaran LPJU	14,200,421,000	10,840,808,364	76.34
	63. Pengadaan Lampu Kota	1,000,000,000	995,450,000	99.55
	64. Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi PJU	269,561,000	263,721,000	97.83
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar	3,153,023,850	3,134,956,658	99.43
	65. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Trotoar	599,948,000	594,708,984	99.13



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	66. Pembangunan Trotoar	2,410,385,000	2,401,498,574	99.63
	67. DED Pembangunan Trotoar	142,690,850	138,749,100	97.24
	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	43,262,840	28,937,585	66.89
	68. Pembinaan Jasa Konstruksi	43,262,840	28,937,585	66.89
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	402,808,450	329,500,030	81.80
	69. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	116,277,600	92,458,790	79.52
	70. Operasional BKRD dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang	100,915,000	99,375,566	98.47
	71. Penyusunan Revisi Perda RTRW	125,615,850	90,913,274	72.37
	72. Penyusunan Raperda Penyerahan Asset Fasum Fasos Pengembang Perumahan	20,000,000	18,529,900	92.65
	73. UKL UPL Pembangunan Jembatan Gantung Tlogowungu dan Embung Cemoro	40,000,000	28,222,500	70.56
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,997,119,440	4,672,226,883	93.50
	74. Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh	97,162,800	86,329,300	88.85
	75. Penataan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	930,988,000	927,076,700	99.58
	76. Pemeliharaan Taman	1,499,999,640	1,208,909,983	80.59
	77. Pembangunan City Walk	1,429,149,000	1,412,147,400	98.81
	78. Pembangunan Kawasan Aloon-Aloon lanjutan (depan BCA)	1,039,820,000	1,037,763,500	99.80
	Program Pengembangan Perumahan	1,184,454,000	1,150,025,137	97.09



SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	79. Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni	222,871,100	212,975,043	95.56
	80. Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa	198,714,300	179,683,333	90.42
	81. Pengadaan PSU Rusunawa	762,868,600	757,366,761	99.28
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1,249,695,900	1,213,020,728	97.07
	82. Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	181,260,000	165,520,517	91.32
	83. Dana Gotong royong	974,436,000	964,380,425	98.97
	84. Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	93,999,900	83,119,786	88.43
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	8,200,000,000	8,169,209,827	99.62
	85. Pengadaan Tanah Pemerintah	8,200,000,000	8,169,209,827	99.62
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	38,411,000	36,987,296	96.29
	86. Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	38,411,000	36,987,296	96.29
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3,500,000	3,496,575	99.90
	87. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3,500,000	3,496,575	99.90

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp. 12.000.341.016,00-
2. Belanja Modal, Barang dan Jasa, sebesar Rp 115.675.116.533.00



A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Patut disyukuri bahwa seluruh Program Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2018 telah berhasil dilaksanakan. Dari sisi target Pendapatan tercapai melebihi target yaitu sebesar 110% dari target Rp 80.000.000,00 terealisasi Rp 88.080.000,00. Dari Total anggaran tahun 2018 sebesar Rp 138.288.592.493,00 terserap sebanyak Rp 127.675.457.549,00 atau 92,32 %, sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp.10.613.134.944,00 Dari 21 program yang tertuang dalam 82 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Tantangan yang harus dihadapi kedepan antara lain Peningkatan jumlah kegiatan dan anggaran yang disisi lain jumlah anggaran yang tinggi berbanding terbalik dengan keterbatasan jumlah Personel akibat pensiun dan banyaknya Pembangunan Infrastruktur di



Kabupaten Temanggung oleh SKPD lain yang melibatkan personel dari DPUPKP Kabupaten Temanggung.

Tantangan tahun mendatang menuntut perbaikan dan langkah strategis yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tercapai akuntabilitas, produktifitas, efektifitas dan efisiensi yang lebih baik guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*).

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Temanggung, Februari 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir.SUPARDIYONO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 199302 1 001









